

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strategi secara sederhana dan eksplisit memiliki makna sebagai cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan serta kemampuan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam upaya pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri.¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk mengaktualisasikan potensi yang dalam hal ini dikenal dengan istilah modal sosial, yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah penekanan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir dan memajemen diri mereka sendiri untuk mampu mandiri pada akhirnya.

Tujuan pemberdayaan adalah dalam rangka mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun indikator keberhasilan pemberdayaan

¹ Harry Hikmat. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press 2013, Edisi Revisi). h. 54

tidak sekedar menekankan kepada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan, modal sosial dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan *bottom-up*, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam walaupun dalam satu komunitas. Dalam hal ini agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi inilah yang menjadi acuan agen pemberdayaan untuk menentukan perencanaan pemberdayaan (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan *klien*/sasaran. Keterlibatan sasaran dalam tahapan perencanaan ini merupakan salah satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional untuk mensukseskan pemberdayaan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan setidaknya melalui 5P², yaitu:

a) Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.

² Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung, Aditama.2005). h.

b) Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c) Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d) Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e) Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.³

Dubois dan Miley menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- a) Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefeksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien/sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu serta menekankan kerjasama klien (*self partnerships*).
- b) Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk menghormati dan harga diri klien/sasaran, mempertimbangkan

³ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Berbasis Kerakyatan*. (Yogyakarta. UGM Press, Humaniora: 2008) h. 72

keragaman individu, berfokus pada klien serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien/sasaran.

- c) Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, mengharagai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar serta melibatkan klien/sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.
- d) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, melaakukan riset dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidakselarasan kesempatan.⁴

Semua cara atau teknik di atas menunjukkan perlunya menempatkan sasaran pemberdayaan sebagai subjek yang memiliki keragaman karakter, potensi dan kebutuhan. Masalahnya adalah bagaimana agen pemberdayaan dapat membangkitkan kesadaran dan memotivasi *klien*/sasaran agar mampu menggali potensi diri dan lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Strategi pemberdayaan hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Menurut Suyono, gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model (laboratorium). Suatu model cenderung harus membuat dulu sebuah model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaptasi, melakukan

⁴ Suharto. *Op. cit.* h. 145

penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan serta cara/pendekatan mereka. Dengan demikian kondisi masyarakat lokal.⁵

Untuk mengambil definisi pembangunan masyarakat desa pada suatu negara, memang sangatlah rumit. Banyak yang mengidentifikasi bahwa pembangunan masyarakat desa sebagai usaha perbaikan setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk berkerja sama.⁶ Oleh karena itu setiap bangsa memiliki ideal tertentu mengenai pembangunan desa yang diidam-idamkan.

Pembangunan masyarakat desa berasal dari kata *community development* yang dapat diartikan sebagai suatu proses, metode, atau sebagai sebuah gerakan. Irwin Sanders dalam kutipannya mengatakan *community development* sebagai suatu proses aksi social yang di dalamnya warga dari masyarakat mengorganisasi diri mereka sendiri untuk *planning actions*, menentukan *needs* dan *problems individu* maupun kelompok, membuat berbagai macam kegiatan untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan segala budi daya masyarakat semaksimal mungkin dan jika terpaksa meminta bantuan pemerintah.⁷

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata “empowerment” mulai ramai diperbincangkan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak

⁵ Haryono Suyono, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta.2005). h. 66

⁶ *Ibid.* h. 74

⁷ Lee-Jay, C, Et.al, *Population Growth of Indonesia* (Honolulu: The University Press of Hawaii, 1982). h. 14

digulirkannya program inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal dengan inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu istilah pemberdayaan dan pengentasan-kemiskinan merupakan “saudara kembar” yang selalu menjadi topik dan kata kunci dalam upaya pembangunan.⁸

Hal itu, tidak hanya belaku di Indonesia, bahkan World Bank dalam Bulletinnya Vol. 11 No.4/Vol. 2 No. 1 Oktober-Desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung tombak dari strategi trisula (*Three-Pronged Strategy*) untuk memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki dasawarsa 90-an, yang terdiri dari penggalakan peluang, fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan keamanan.⁹

Fear and Schwartzwalder mengemukakan bahwa pemberdayaan “a process in which increasingly more members of a given area or environment make and implementsocially responsible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others”.¹⁰

Dalam hubungan ini, Robbins, Chatterjee, and Canda secara singkat menyatakan: *Empowerment- “process by which individuals and groups gain power access to resources and control over their own lives. in doing so, they*

⁸ Totok, Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 25

⁹ *Ibid.*, h 26

¹⁰ *Ibid.*, h 26

gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals”¹¹

Dalam arti lain Pemberdayaan adalah memberikan daya atau penguatan terhadap keberdayaan individu dan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat demi mencapai tujuan bersama, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi aksesibilitas terhadap sumberdaya yang terkait dengan aktivitas sosialnya.

Pemberdayaan masyarakat secara umum dimaknai sebagai cara membangun masyarakat melalui aturan dan pelebagaan potensi-potensi yang ada serta memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.¹²

Dalam pengertian lain pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, sebuah pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan ife mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*” yang berarti memberi daya, memberi” power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Payne menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya

¹¹ *Ibid. d*, h 26

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung, Aditama, 2005), h. 38.

bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Definisi di atas mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan secara universal.¹³

Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Islam dapat kita lihat pengertian yang dikemukakan oleh Enjang AS dan Aliyuddin pengembangan secara istilah kegiatan dakwah dengan pentransformasian ajaran Islam melalui aksi amal shaleh berupa pemberdayaan (*taghyir, tamkin*) sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan, serta ekonomi umat dengan mengembangkan pranata-pranata sosial, ekonomi, dan lingkungan atau pengembangan kehidupan muslim dalam aspek-aspek kultur universal.¹⁴

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan sebuah standar kehidupan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang dimaksud tidak dilihat

¹³ *Ibid.*, h.154

¹⁴ Enjang. AS dan Aliyuddin, *Dasar-Dasar ilmu Dakwah*. (Padjadjaran, Widya, 2009), h.

pada batas-batas minimum berupa kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal. Akan tetapi kebutuhan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan akan eksistensinya, dan memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Beberapa ciri masyarakat yang berdaya antara lain mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan dan mengantisipasi kondisi perubahan ke depan, mampu mengarahkan dirinya sendiri, memiliki kekuatan untuk berunding, memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan bertanggungjawab atas tindakannya yang mengacu pada nilai-nilai Islam.

Dengan demikian dapat ditarik benang merah kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat Islam adalah upaya sadar yang dilakukan orang perorangan, kelompok serta masyarakat Islam dalam upaya memaksimalkan potensi diri masyarakat dalam memberdayakan diri guna mencapai tujuan Bersama dalam konteks pemberdayaan dan pembangunan.

Unsur selanjutnya dari pemberdayaan masyarakat tergantung dari bagaimana melihat pemberdayaan itu sendiri. Cara melihat pemberdayaan masyarakat sebagai proses, program, metode, dan gerakan sosial. Dengan demikian, wilayah kajian pemberdayaan masyarakat Islam adalah tergantung menempatkan posisi pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Sejatinya pemberdayaan masyarakat didasarkan pada prinsip bagaimana suatu masyarakat dapat mandiri secara menyeluruh di atas banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada sehingga menjadikannya

sebagai potensi diri dalam memberdayakan masyarakat baik secara sosial, ekonomi wawasan berpikir serta seluruh aspek kehidupan.

Berbagai macam tuntutan kemandirian masyarakat yang harus dicarikan solusinya tersebut, Pesantren semestinya hadir menjadi solusi bangkitnya tatanan sosial kemasyarakatan yang dalam istilah lain disebut ummat melalui pemberdayaan masyarakat yang *notabene* bernuansa Islam, Sesuai tuntunan sunnah serta diharapkan mampu menuju kearah masyarakat madani atau *The Real Civil Society* yang mengaktualisasikan nilai keIslaman dalam berbagai aspek pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan (konteks terapan) merupakan pendekatan pembangunan yang masih sangat relevan untuk mengembangkan masyarakat menuju *The Real Civil Society* atau lebih tepat masyarakat madani yang didasari dimensi *Theisme* melalui jalur religius yang benar. Dimensi *Theisme* sangatlah urgen didasarkan agar terhindar dari jebakan materialistik dan empirik tanpa kesatuan antara intelektualitas dan sripiritualitas.¹⁵ Walaupun upaya pemberdayaan ini tidak mudah dilakukan untuk mencapai hasil optimal, namun atmosfer otonomi daerah, kemudahan teknologi dan informasi dan keterbukaan politik akan memberikan harapan terhadap upaya meningkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di kawasan pesisir sebagai pelaku langsung pembangunan bangsa.

¹⁵ Edi Suharto. *Op.Cit.* h. 65

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.¹⁶

Al Buraey menyimpulkan perspektif pembangunan Islam, baik matra sosial-ekonomi, politik, administrasi, atau budaya merupakan suatu sistem menyeluruh dan terpadu yang mengalamatkan dirinya kepada semua masalah-masalah kepribadian (eksistensi) manusia, baik jasmani ataupun rohani. Islam sangat menekankan agar menyeimbangkan antara keduanya. Tentunya aplikasi di kehidupan bermasyarakat adalah tumbuh kembangnya semangat untuk menyejahterakan diri dan orang lain. Apabila konsepsi ini telah menjadi prinsip hidup manusia saat ini maka akan terbentuk suksesnya pembangunan bangsa.¹⁷

¹⁶ Qahthani, al-Said bin Ali, *al-Hikmatu fid Dakwah Ilallah Ta'ala*, Terj. Masykur Hakim: Dakwah Islam Dakwah Bijak, (Jakarta, Gema insani Press, 1994), h. 73

¹⁷ *Ibid.* h. 50

Pengembangan Masyarakat Islam menjelaskan adanya lima dalam memberdayakan umat antara lain:

1. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi.
2. Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki.
3. Pemberdayaan masyarakat harus dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.
4. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sebatas diartikan sebagai kehadiran tetapi kontribusi tahapan yang mesti dilalui oleh suatu dalam program kerja pemberdayaan masyarakat.
5. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Kelima prinsip turunan tersebut sebenarnya cerminan aktualisasi nilai Islam dalam memberikan pandangan hidup sehingga menunu tatanan kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Kunci keberhasilan tersebut yakni penyatuan antara dimensi material dan spritual dalam kehidupan sosial.¹⁸

Pemberdayaan masyarakat Islam yang begitu identik dengan upaya pembangunan yang dilakukan sebagai bentuk sumbangsih pesantren terhadap pembangunan masyarakat, terus menuai hasil dan dampak positif bagi tatanan sosial masyarakat terlebih lagi masyarakat pedesaan. Agenda pemberdayaan ini yang kemudian umum pada masyarakat pedesaan kental dengan nilai dakwah yang dilakukan agen perubahan sosial yakni pondok pesantren.

¹⁸ *Ibid.*, h. 61

Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam Islam posisi dakwah sangatlah penting karena dakwah merupakan kegiatan yang berperan secara langsung dalam pembentukan persepsi umat tentang berbagai nilai kehidupan.¹⁹ Dakwah juga merupakan kegiatan untuk mengadakan rekonstruksi sosial untuk didesain dan dipolakan oleh ajaran Islam serta mentransformasikan nilai-nilai atau syariat Islam kepada masyarakat, sehingga tercapai pembentukan masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah.²⁰ Dakwah merupakan suatu aktivitas yang berorientasi pada pengembangan masyarakat muslim. Dalam pengertian agama, dakwah mengandung arti panggilan dari Allah SWT dan Nabi SAW untuk umat manusia agar percaya kepada ajaran Islam dan mewujudkan ajaran yang dipercayainya itu ke dalam segala aspek kehidupan.

Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur pemaksaan.²¹ Sementara Quraish Shihab melihat bahwa

¹⁹ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Amzah. 2009), h. 2

²⁰ M.Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 6

²¹ M.Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 6

Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, ia harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek.²²

Dengan demikian esensi dari dakwah adalah bagaimana dakwah mampu memberi perubahan terhadap orang lain menuju ridha Allah SWT. dengan indikator menjalankan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala apa yang dilarang Allah SWT. Secara umum dakwah bertujuan mengubah sasaran perilaku dakwah agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam tatanan kenyataan kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan, agar terdapat kehidupan yang penuh dengan keberkahan di langit dan keberkahan di bumi. Sementara tujuan-tujuan umum tersebut harus dirumuskan ke dalam tujuan-tujuan yang lebih operasional dan dapat dievaluasi keberhasilan yang telah dicapai. Misalnya, tingkat keistiqamahan dalam mengerjakan shalat, tingkat keamanan dan kejujuran, berkurangnya angka kemaksiatan, ramainya shalat berjamaah di masjid, berkurangnya tingkat pengangguran, penjual minuman keras dan lain sebagainya. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di

²² Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2001), h.194

dunia dan di akhirat untuk memperoleh ridho Allah SWT, Yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah SWT.²³

Menurut Asmuni Syukir ”tujuan umum dakwah mengajak umat manusia (meliputi orang-orang mukmin maupun orang kafir atau musyrik) kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah SWT agar dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat.”²⁴ Untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, namun membutuhkan perjuangan dari da’i dalam menyapaikan dakwah kepada mad’u. Potensi da’i yang potensial cenderung berasal dari pendidikan pesantren yang secara keilmuan di asah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat baik yang berhubungan dengan keduniaan maupun akhirat.

Dakwah harus menghadirkan kegembiraan dan solusi hidup yaitu apabila dakwah yang ada dilakukan dengan hikmah, seperti dalam QS, An-Nahl, 16: 125, yang dalam pengertian Qohtani²⁵ bahwa hikmah mencakup dua macam: hikmah teoritis berupa *Mauidhah Hasanah* dan hikmah praktis berupa *Mujadalah Hasanah*. Dakwah dengan konsep hikmah yang dikembangkan nantinya akan mampu memperkenalkan konsep hidup dan

²³ Samsul Munir Amin *Op. Cit.*, h. 5

²⁴ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 2003), h. 51

²⁵ Qahthani, al-Said bin Ali, *Al-Hikmatu fid Dakwah Ilallah Ta’ala*, Terj. Masykur Hakim: Dakwah Islam Dakwah Bijak, (Jakarta, Gema Insani Press, 1994), h. 27

praktek kehidupan dengan memberi informasi²⁶ secara baik²⁷ juga dapat mengajak ummat hidup produktif.²⁸

Dakwah mutlak dilakukan sebagai ikhtiar untuk menyebarkan Islam ketengah masyarakat yang menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Umat Islam memiliki peran sangat penting sebagai pelaku dakwah yang harus menebarkan benih-benih amar ma'ruf nahi munkar ditengah pergaulan hidup masyarakat yang semakin beraneka ragam. Usaha untuk menyebarkan ajaran Islam ketengah masyarakat bagian dari usaha dakwah yang mesti dialaksanakan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun harus dilaksanakan oleh manusia sebagai *Khalifah Fil Ardhi*. Agar dakwah dapat dilaksanakan dengan baik maka perlulah dibentuknya lembaga atau organsiasi sebagai salah satu kekuatan umat Islam dalam satu kesatuan spiritual dengan teroganisir lebih baik untuk mencapai tujuan dakwah, salah satu lembaga yang dapat menjadikan dakwah terlaksana dengan baik dan terarah adalah pesantren.

Secara bahasa pesantren berasal dari kata *Santri* yang mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang berarti tempat tinggal para santri.²⁹ Kata santri sendiri, shastri, yaitu orang yang tahu buku-buku suci agama atau

²⁶ Davis, Gordon B, *Sistem informasi Managemen, Bagian iI*, (Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1995), h. 28

²⁷ Devito, Joseph A, *Komunikasi Antar Manusia, Edisi kelima*, (Jakarta, Professional Books, 1997), h. 429-430

²⁸ Littlejohn, Stephen W & Foss Karen A, *Teories of Human Communication, Ninth Edition*, USA, Thomson Wadsworth. 2008, h. 230-232; Mursi, Abdul Hamid, *Asy Syakhshiyatil Muntajah*. terjemah Moh. Nur Hakim: "*SDM yang Produktif; Pendekatan Al-Qur'an dan Sain*" (Jakarta, Gema insani Press, 1997), h. 45-46

²⁹ Hasan Alwi, *Tata Bahasa Baku*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2003) Edisi Ketiga, h. 86

orang yang telah sarjana ahli kitab suci.³⁰ istilah pesantren di Indonesia lebih populer dengan sebutan pesantren. Lain halnya dengan pesantren, pondok (kamar, gubuk, rumah, kecil) dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesadaran bangunan. Sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *Funduq*, yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana.³¹ Dengan demikian, pesantren adalah sebuah tempat dimana para santri menginap dan menuntut ilmu (*mathlab*).

Dalam pandangan Nurkholis Madjid, kata *santri* berasal dari kata *Sastri* dalam bahasa sansekerta yang berarti melek huruf, pendapat ini menurut Madjid agaknya didasarkan atas kaum santri adalah kelas Literary bagi orang Jawa yang berusaha mendalami ajaran agama melalui kitab-kitab yang bertulis Bahasa Arab.³² Kemudian dari kata *Cantrik*, perkataan cantrik berasal dari Bahasa Jawa yaitu “*Cantrik*”, yang berarti selalu mengikuti guru kemana guru ini pergi menetap.³³

Sementara dalam pengertian lain pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keIslaman, dipimpin oleh kyai sebagai pemangku /pemilik pesantren dan dibantu oleh ustadz/guru yang mengajarkan ilmu-ilmu ke-Islaman kepada santri, melalui, metode dan tehnik yang khas. Pesantren juga berarti lembaga pendidikan tradisional untuk mempelajari, memahami mendalami, menghayati dan mengamalkan

³⁰ Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat*, (Surabaya: iMTIYAZ, 2011), Cet Ke i.h.

³¹ *Ibid.*, h. 65

³² Nurkholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina. 1997) h. 32

³³ *Ibid.* h. 45

ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan dan sebagai pedoman hidup sehari-hari.³⁴

Dari beberapa pengertian pesantren yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah *Suatu lembaga pendidikan sekaligus lembaga dakwah Islam dimana para santri atau pelajarnya tinggal di pesantren yang dipimpin oleh seorang kyai dengan tujuan untuk mempelajari, memahami dan mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pada pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.*

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menegakkan menyiarkan dan menyebarkan agama Islam, pesantren memiliki dua fungsi utama, yaitu: fungsi kegiatan pengajaran, pemahaman dan pendalaman agama Islam dan fungsi menyampaikan dan mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat.³⁵ Secara garis besar pesantren atau lembaga atau tempat pendidikan dan pengajaran agama Islam yang mempunyai tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Sebagai salah satu kekayaan budaya Islam di Indonesia, pesantren memiliki ciri khas tersendiri, terlihat dari sistem pendidikan yang diterapkan.

Pesantren diklasifikasikan menjadi tiga dimensi. *Pertama*, pesantren sebagai lembaga pendidikan masyarakat. Pangabdian dan perjuangan yang di dalamnya melekat fungsi sosial keagamaan. *Kedua*, Pesantren merupakan

³⁴ *Ibid.* h 46

³⁵ Babun Suharto. *Op cit*, h. 11

pusat pengembangan sumber daya manusia yang menekankan keseimbangan antara potensi ketakwaan, kecerdasan ilmiah dan keterampilan sebagai tiga potensi dasar manusiawi yang seharusnya selalu dalam keseimbangan. *Ketiga*, kemampuan mempertahankan keberadaannya yang luar biasa, dari waktu ke waktu sehingga berhasil memberikan kontribusi peran yang sangat berarti.³⁶

Ketiga fungsi yang melekat pada *lahiriyah* pesantren, secara sistematis mewajibkan agar pesantren mampu menjadi agen perubahan sekaligus lembaga dakwah dalam rangka memanusiaikan manusia. Sehingga ketradisonalan pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak menjadikan pesantren kuno dan terbelakang. Sebab sebagai lembaga dakwah, pesantren mesti mampu mengembangkan sumber daya manusia tidak hanya dalam lingkup dakwah namun lebih jauh lagi menjadi wadah bagi masyarakat untuk mandiri dan berkembang.

Eksistensi pesantren di tengah-tengah masyarakat global merupakan bagian dari tuntutan dakwah yang harus diantisipasi serta dicarikan solusi terbaiknya dalam mengembangkan, memberdayakan serta menjadikannya sebagai pusat dakwah yang menjanjikan dalam pencapaian tujuan dakwah secara luas.

Pada umumnya pesantren yang telah mapan, memiliki elemen-elemen lain disamping elemen-elemen yang melekat pada identitasnya sebagai Lembaga Pendidikan. Misalnya terdapat lahan pertanian atau

³⁶ Babun Suharto. *Op cit*, h. 32

peternakan, took atau koperasi, bangsal-bangsal praktikum untuk pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain.

Beberapa pesantren menjadikan tembok atau pagar sebagai pemisah antara pesantren dengan masyarakat sekitar, dengan alasan kedisiplinan. Namun kontak antara masyarakat bahkan keterlibatan masyarakat maupun pesantren dalam pemabangunan desa sangat erat sekali. Walaupun kepemimpinan desa bukan di tangan kyai pesantren, namun peranan pesantren dalam pembangunan desa melalui fatwa-fatwa kyai pesantren sering kali menjadi legitimasi terhadap surat perintah dari daerah sekitarnya.³⁷

Pesantren sebagai institusi dakwah dan pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan memiliki peran strategis di masyarakat. Hal ini dikarenakan pesantren selain tempat pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk pembangunan, juga bisa berfungsi sebagai lembaga kontrol sosial. Pelaksanaan pembangunan selain perlu dilakukan pengawasan fungsional, diperlukan pula pengawasan oleh masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat.

Pesantren sebagai tempat tokoh sentral para Kyai sangat efektif dalam melakukan kontrol sosial kemasyarakatan tersebut. Sebagai agen perubahan dan pengembangan sumber daya manusia dalam usaha pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan, pesantren juga berfungsi

³⁷ H. M. Yacub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa* (Bandung: Angkasa. 1993). h. 73

merekrut tenaga kerja terampil. Sebagaimana di negara industri bahwa pesantren adalah motor penting dalam penyediaan tenaga kerja.

"Of the different mingling specialists, school is one of the most remarkable, exposing the person to a serious inculcation that starts in the early years and proceeds with well into development. School "have developed, in modern social orders, into the spot of operators of job distribution," it being their assignment to enroll, train, and inculcate the work force required for job execution in different organizations inside the social framework".³⁸

“Dari berbagai agen sosial, pesantren merupakan lembaga yang paling ampuh bagi upaya indoktrinasi terhadap individu yang secara cepat dan terus menerus menuju kedewasaan. Pesantren telah tumbuh menjamur dalam masyarakat industrial, dan menjadi agen bagi alokasi peran yang bertugas melakukan rekrutmen, melatih dan melakukan indoktrinasi terhadap personil yang diperlukan bagi kinerja peran pada institusi-institusi lain dalam sistem sosial”

Dengan demikian pesantren yang sudah maju, dan sebagai lembaga dakwah yang memiliki ciri khusus komunitas masyarakat religius dalam tatanan masyarakat desa; juga berperan merekrut; mendidik dan melatih individu berdasarkan kemampuan, kemauan serta budaya masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pesantren disebut sebagai lembaga ampuh untuk pengembangan sumber daya manusia dan juga pesantren berkemampuan mendidik individu berkualitas.³⁹

Pondok Pesantren Darul Huffaz Lampung telah mengembangkan lebih luas kelompok pertanian lemon, pertanian Alpokat varietas unggul dan

³⁸ *Ibid.*, h. 22

³⁹ Nurkholis Madjid. *Op. Cit.* h. 80

pengembangan terhadap koperasi pesantren yang berbasis Islam, mampu menjadi agen pengembangan dan perubahan sosial dalam pembangunan dengan menyediakan tenaga terdidik dan terlatih untuk memberdayakan masyarakat di sekitar desa Bernung dan Negeri Sakti kecamatan Gedong Tataan Pesawaran Lampung.

Pondok Pesantren Darul Huffaz dengan potensi desa yang berupa lokasi pertanian dengan segala upaya dan pendekatan terhadap masyarakat, kini hadir menjadi agen perubahan dalam memberdayakan potensi diri masyarakat yang kental dengan pertanian. Seluas lebih kurang 10 *Hektare* lahan warga di sekitar pesantren kini disulap menjadi lahan pertanian lemon yang dikembangkan oleh Pesantren Darul Huffaz, langkah ini dilakukan pesantren, dalam hal ini sebagai agen perubahan sosial untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri baik dalam berfikir, berinteraksi sosial, ekonomi, maupun lainnya.

Upaya pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dengan terfokus pada pembentukan kelompok-kelompok pemberdayaan merupakan cerminan bahwa dengan latar belakang masyarakat sekitar pesantren yang mayoritas sebagai petani sangat tepat tentunya mengembangkan masyarakat dengan cara memfokuskannya pada sektor pertanian. Demikian juga pada sektor ekonomi, sebab perputaran kegiatan ekonomi di Pesantren pada dasarnya sangat *mobile*, sehingga perlu menjadi perhatian khusus bagi pesantren untuk menjadikan hal tersebut sebagai salah satu kemandirian masyarakat sebagai cerminan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Dari aspek pertanian dan perkebunan, 10 *Hektare* lahan jeruk lemon yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Darul Huffaz menjadi jawaban akan tumbuh kembangnya pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan. Lebih dari 20 warga masyarakat di sekeliling pesantren menjadi objek pemberdayaan masyarakat oleh pesantren sehingga ini juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pondok Pesantren Darul Huffaz yang secara geografis berada di perbatasan desa Negeri Sakti dan desa Bernung di kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran menilai bahwa potensi masyarakat di desa tersebut sangat identik dengan pertanian, sangat baik tentunya jika melakukan pengamatan terhadap potensi tersebut yang kemudian dapat dikembangkan bersama-sama baik oleh masyarakat secara mandiri maupun oleh pesantren dan pemerintah.

Kecamatan Gedong Tataan yang terbagi menjadi 19 desa memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sektor penunjang laju pembangunan. Seperti potensi pertanian, perkebunan, perdagangan dan pariwisata. Kecamatan Gedong Tataan merupakan kecamatan agraris, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan lahan pertanian di kecamatan Gedong Tataan. Ketersediaan lahan sawah di kecamatan Gedong Tataan seluas kurang lebih 2.489 *Hektare* dan ketersediaan lahan pertanian non sawah seluas kurang lebih 14.615 *Hektare*.

Desa Negeri Sakti merupakan salah satu desa di kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang memiliki luas wilayah 400 *Hektare*.

Desa tersebut terletak di sebelah timur Gedong Tataan yang merupakan ibukota kecamatan. Seluruh jalan desa merupakan jalan beraspal yang sangat mendukung kelancaran akses hubungan desa Negeri Sakti dengan ibukota kecamatan dengan jarak 10 km yang dihubungkan oleh aspal sehingga memungkinkan hubungan desa Negeri Sakti dengan ibukota kecamatan berjalan baik dan lancar. Dilihat dari jangkauan (*orbitasi*), maka dapat disimpulkan jarak antara desa dan ibukota 10 km kemudian jarak antara desa dan kabupaten 30 km kemudian jarak antara desa dan ibukota provinsi 15 km.

Dari segi agama, penduduk desa Negeri Sakti berdasarkan data yang tergambar pada profil desa adalah mayoritas memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel penyebaran penduduk berdasarkan agama di desa Negeri Sakti.

Tabel 1.
Keadaan penduduk desa Negeri Sakti berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk (Orang)
1	Islam	4491
2	Kristen	5
3	Katolik	3
Jumlah		4499

Sumber: Profil desa Negeri Sakti

Berdasarkan data pada Tabel tersebut diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa Negeri Sakti (4.491 orang) menganut agama Islam.

Jika mengambil pengertian terkait dengan pengertian masyarakat bahwa masyarakat adalah *Sarikat* baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Melayu. secara maknawi dalam kata *Sarikat* tersimpul beberapa pengertian yang berhubungan dengan pembentukan suatu kelompok atau golongan atau kumpulan.⁴⁰ Dalam ilmu sosial masyarakat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang cukup lama hidup dan bekerja sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan mengenali dirinya sebagai satu kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu⁴¹, dengan kata lain yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia⁴² yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan.⁴³

Dengan kata lain yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dalam pandangannya,⁴⁴ Hasan sadali mengungkapkan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain maka dapat diambil satu pemahaman bahwa yang dinamakan masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama tinggal di suatu tempat atau daerah mempunyai aturan tertentu cara dan pandangan hidup tertentu memiliki tujuan yang sama.⁴⁵

⁴⁰ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan sosiografi*, (Jakarta: Mizan, tt), h 15

⁴¹ Murtadha Muntahhari, *Masyarakat Dan Sejarah*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 15

⁴² Abu Ahmadi, *Sosiologi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), h 31

⁴³ Sidi Gazalba. *Op. cit.* h 87

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h 9

⁴⁵ Abu Ahmadi. *Op. Cit.* h 58

Dalam pandangan Islam, masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang bertitik tolak dari Islam dan tunduk pada sistematika Islam di mana masyarakat tidak diliputi oleh suasana Islam, corak Islam, bobot Islam prinsip Islam, syariat dan aturan Islam serta akhlak Islam bukan termasuk masyarakat Islam. Dengan makna lain bahwa masyarakat Islam bukan sekedar masyarakat yang beranggotakan agama Islam kemudian menjalankan perintah salat puasa zakat dan haji saja namun lebih kepada pelabelan/pemaknaan diri terkait dengan prinsip-prinsip⁴⁶ dan amal kehidupan yang bersistem pada nilai-nilai keIslaman.⁴⁷

Perbedaan yang kemudian muncul terkait dengan masyarakat Islam dengan masyarakat lain adalah pada peraturan-peraturan khusus undang-undang yang Qur'ani, anggota-anggota yang berakidah satu, Aqidah Islam dan berkiblat satu. dengan maksud bahwa masyarakat Islam adalah satu-satunya masyarakat yang tunduk kepada Allah SWT dalam segala sesuatu dan memahami bahwa makna ibadah itu tidak hanya melaksanakan syiar-syiar keagamaan seperti salat puasa Haji dan zakat saja. Tetapi lebih kepada penghambaan diri kepada Allah SWT dengan maksud menjalankan amar ma'ruf nahi munkar.⁴⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang mendasarkan kehidupannya pada persamaan aqidah dan

⁴⁶ Mohammad Quthb, *Islam ditengah pertarungan tradisi*, (Mizan: Bandung, 1993), h 186.

⁴⁷ Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama Dan Politik*, (Solo: Ramadhani, 1991), h 102

⁴⁸ Sidi Gazalba. *Op. Cit.* h 77

persamaan tujuan dengan beberapa batasan-batasan termasuk batasan teritorial berbangsa dan bernegara.

Dalam pandangan al-Qur'an atau perspektif al-Qur'an masyarakat Islam yang ideal adalah masyarakat Islam yang ditopang oleh keimanan yang kokoh kepada Allah SWT sebagaimana tersurat dalam al-Qur'an surat Ali Imron ayat 110 dimana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa umat terbaik adalah umat yang melakukan atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang semestinya berada pada jalur Amar ma'ruf nahi munkar dengan satu tujuan bahwa mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.⁴⁹

Hal ini kemudian memunculkan beberapa istilah-istilah yang ada dalam al-Qur'an yang identik dengan masyarakat Islam:

1. Ummatan Wahidah
2. Ummatan wasathon
3. Ummatan Muqtashidah
4. Khoiru Ummah.⁵⁰

Masyarakat di desa Negeri Sakti memiliki keberagaman mata pencaharian karena sebagian kecil masyarakat sudah memperoleh informasi baik dari media masa dan internet sehingga sebagian masyarakat tidak bertumpu pada profesi sebagai petani walaupun sebagian besar profesi itu masih ditekuni karena ditunjang dari keadaan geografis yang baik.

⁴⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h 425

⁵⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h 425

Hal ini ditunjang oleh penyebaran penduduk berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat desa Negeri Sakti dengan mayoritas tani dan buruh tani.

Tabel 2.
Keadaan Penduduk Desa Negeri Sakti Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Karyawan	331
2	Tani	1388
3	Buruh Tani	960
4	Pensiunan	226
5	Jasa	184
6	Pedagang	467
7	Pengrajin mebel	59
8	Pengrajin tapis	13
9	PNS	183
10	Buruh bangunan	94
11	Pengangguran	112
Jumlah		4022

Sumber: Profil Desa Negeri Sakti

Sedangkan desa Bernung adalah salah satu desa yang terletak di sebelah timur kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran. Desa ini memiliki luas wilayah Pemerintahan kurang lebih seluas 900 Ha/M². dengan batas-batas wilayah pemerintahan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sukabanjar kecamatan Gedong Tataan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sungai Langka kecamatan Gedong Tataan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Taman Sari kecamatan Gedong Tataan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Negeri Sakti kecamatan Gedong Tataan

Topografi desa Bernung kecamatan Gedong Tataan adalah lembah dengan ketinggian rata-rata 200 Mdpl. Desa ini memiliki curah hujan sedang dengan intensitas hujan sebesar 1000-1200 dengan 6 bulan hujan dan 6 bulan kemarau.

Desa ini memiliki jarak tempuh dari ibukota propinsi sejauh 17 Km dengan waktu tempuh 30 menit dari pusat pemerintahan provinsi Lampung, sedangkan jarak ke pemerintahan kabupaten memiliki jarak sejauh 11 Km dengan waktu tempuh 20 menit. Dan 1 km jarak tempuh menuju kantor kecamatan Gedong Tataan.

Penduduk desa Bernung kecamatan Gedong Tataan berjumlah 5171 Jiwa yang terdiri dari 2420 Jiwa laki-laki dan 2741 jiwa perempuan dengan 1292 Kepala Keluarga (KK). Sumber penghasilan masyarakat desa Bernung adalah Pertanian, perkebunan, dan perdagangan.

Dari hasil prasarvei didapat bahwa meski belum menjadi aspek utama meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, setidaknya ada sektor lain seperti tanaman buah naga bahkan budidaya jamur tiram. Sebab hasil dari tanaman jeruk lemon mulai dinikmati oleh masyarakat per 2019. bukan suatu hal yang mustahil pertumbuhan perekonomian masyarakat

melalui perberdayaan di bidang pertanian menjadi tolak ukur sejahteranya masyarakat.

Sudah semestinya pesantren mengembangkan diri tidak hanya terfokus pada bidang pendidikan dan dakwah saja, namun lebih jauh lagi menuju pemberdayaan masyarakat yang madani sehingga mampu mandiri dalam segala aspek. Baik dari segi pola pikir, manajemen, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebab fitrah bahwa pesantren adalah wadah pendidikan dan dakwah memang tidak dapat dipungkiri. Namun bahwa pesantren merupakan *icon* pemberdayaan masyarakat Islam sangat dituntut sebagai bentuk jawaban dari globalisasi.

Masalah yang kemudian muncul adalah strategi pemberdayaan masyarakat yang masih *konvensional* menjadi daya tarik tersendiri dalam penelitian ini, sebab strategi-strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pesantren kebanyakan dengan memfokuskan arah pemberdayaan dari kharismatik sang kyai pemimpin pesantren. Sehingga penulis menilai perlu adanya terobosan baru dalam strategi pemberdayaan masyarakat Islam setidaknya menghadirkan dan menghasilkan suatu model baru dalam strategi pemberdayaan masyarakat.

Penguatan SDM dalam bentuk pelatihan, pendampingan maupun pembentukan kelompok dipandang perlu dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat di pesantren, sebagai strategi unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian pesantren di tengah globalisasi saat ini menjadi salah satu aspek pemecahan pengentasan

kemiskinan masyarakat yang kemudian menjadi modal besar dalam upaya kemandiriannya. Sehingga kemandirian tersebut mampu menjadi cerminan pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan masyarakat Islam yang lebih mandiri dan bermartabat.

Menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam terkait dengan strategi pemberdayaan yang dilakukan Pondok Pesantren Darul Huffaz Lampung, apakah kemudian pemberdayaan yang dilakukan dengan cara merumuskan strategi-strategi tertentu sehingga melalui pelatihan dan pendampingan serta pembentukan kelompok dan perencanaan kegiatan menjadikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Pondok Pesantren Darul Huffaz berjalan efektif dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesawaran., Apakah ada partisipasi yang kuat dari masyarakat sehingga menopang pesatnya program yang dilakukan atau ada aspek lain yang juga sama dominannya sehingga menjadi pemicu signifikannya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di kabupaten Pesawaran melalui program pemberdayaan yang dilakukan pesantren.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka fokus penelitian ini adalah strategi pemberdayaan masyarakat Islam di kabupaten Pesawaran studi pada program pemberdayaan Pondok Pondok Pesantren Darul Huffaz Lampung. Adapun subfokus penelitian ini adalah:

1. *Scanning Environment* atau pengamatan lingkungan dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat Islam di kabupaten Pesawaran
2. *Formulation Startegy* atau perumusan strategi pemberdayaan masyarakat Islam di kabupaten Pesawaran
3. *Implementation Strategy* atau implementasi strategi pemberdayaan masyarakat Islam di kabupaten Pesawaran
4. *Evaluation and Control* atau evaluasi strategi pemberdayaan masyarakat Islam di kabupaten Pesawaran.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat Islam di kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Huffaz?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa strategi pemberdayaan masyarakat Islam yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Huffaz.
2. Mengetahui dan menganalisa bagaimana perumusan atau perencanaan strategi pemberdayaan masyarakat Islam oleh Pondok Pesantren Darul Huffaz
3. Mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi strategi pemberdayaan masyarakat Islam oleh Pondok Pesantren Darul Huffaz.

4. Mengetahui evaluasi dan pengawasan atau control terhadap strategi pemberdayaan Masyarakat Islam oleh Pesantren Darul Huffaz
5. Menggambarkan dan menjelaskan model pengembangan strategi Pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis khasanah keilmuan bagi pengembangan ilmu di jurusan pengembangan masyarakat Islam khususnya Pemberdayaan Masyarakat Islam dan lebih spesifik lagi dalam ilmu strategi pemberdayaan.
2. Dapat menjadi tolak ukur pengembangan masyarakat Islam dalam pemberdayaan masyarakat melalui pesantren sebagai konfirmasi dari keilmuan strategi pemberdayaan masyarakat.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan program pemberdayaan dan menjadi bahan rujukan bagi masyarakat sekitar tentang bagaimana mengelola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berbasis pesantren.

E. Kerangka Fikir

Kerangka Fikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam yang dilakukan Pondok Pondok Pesantren Darul Huffaz ditinjau dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan yang digunakan untuk mengungkap pokok isi disertasi ini adalah pendekatan sosial utamanya melalui cara pandang Talcott Parsons. Pendekatan Parsons mencoba menabur sebuah pemahaman yang lebih toleran, inklusif, dan terbuka yang lebih dari sekedar perbedaan pendapat dalam menyikapi sebuah masalah sosial. Lebih jauh pendekatan ini juga akan memberikan sebuah jalan baru dalam memahami masyarakat melalui fokus keilmuan yang ada.

Pendekatan Sistem Sosial Parsons menganggap bahwa masyarakat, pada dasarnya, terintegrasi di atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai, norma, dan aturan kemasyarakatan tertentu, suatu *general agreements* yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat.⁵¹ Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *ekuilibrium*. Karena sifatnya demikian, maka aliran pemikiran ini disebut juga sebagai *integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach* atau lebih populer disebut *structural-functional approach*.⁵²

⁵¹ Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern dari Parsons sampai Gabernas*, terj. Paul S. Baut, T. Effendi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57

⁵² *Ibid.* h. 66

Pendekatan ini awalnya muncul dari cara melihat masyarakat dengan dianalogikan sebagai 'organisme biologis'. Auguste Comte dan Herbert Spencer melihat adanya interdependensi antara organ-organ tubuh kita yang kemudian dianalogikan dengan masyarakat.⁵³ Pokok pikiran inilah yang melatar belakangi lahirnya pendekatan Fungsionalisme Struktural atau Sistem Sosial Talcott Parsons. Lebih jauh pendekatan ini dapat dikaji melalui asumsi dasar yang dimilikinya yaitu:⁵⁴ setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil; elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik; setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem; Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya.

Dengan kata lain, suatu sistem sosial, pada dasarnya, tidak lain adalah suatu sistem dari elemen-elemen yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu, yang tumbuh berkembang tidak secara kebetulan, namun tumbuh dan berkembang di atas *concensus* atau nilai di atas standar penilaian umum masyarakat. Yang paling penting di antara berbagai sumber standar penilaian umum tersebut adalah norma-norma sosial. Norma-norma sosial itulah yang membentuk struktur sosial.

Struktur sosial sebagai suatu sistem sosial hanya bisa fungsional

⁵³ Peter Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 67-73

⁵⁴ Ralf Darhendrof, 'Asumsi Dasar Teori Struktural Fungsional' dalam *Pengantar Sosiologi Politik*, (ed.) Damsar (Jakarta: Kencana, 2010), h. 47

apabila semua persyaratan terpenuhi. Suatu sistem sosial akan selalu terjadi keseimbangan apabila ia menjaga *Safety Valve* atau katup pengaman yang terkandung dalam paradigma AGIL. AGIL merupakan akronim dari:

- a) *Adaptation*/adaptasi: yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala sumber yang dapat berupa sosial maupun nonsosial/fisik. Melalui adaptasi ini juga, sistem mampu menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem.
- b) *Goal Attainment*/pencapaian tujuan: yaitu prasyarat fungsional yang menentukan tujuan dan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan oleh suatu pencapaian tujuan. Namun, perhatian utama bukan terfokus pada tujuan pribadi individual, melainkan diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.
- c) *Integration*/integrasi: yaitu harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasi sebuah sistem sosial.⁵⁵
- d) *Latency* atau *latent pattern- maintenance*/pola pemeliharaan

⁵⁵ Lihat D.P. Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1 & 2, terj. (Jakarta: Gramedia, 1986). h.45

laten: yaitu prasyarat fungsional yang dibutuhkan sistem untuk menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. Konsep laten menunjuk pada sesuatu yang tersmbunyi atau tidak kelihatan. Kenapa perlu prasyarat fungsional ini? Apabila sistem sosial menghadapi kemungkinan terjadinya deintegrasi atau perpecahan, maka ada pola pemeliharaan yang tersembunyi yang dapat memelihara agar sistem tetap terintegrasi atau tetap terpelihara.⁵⁶

Di samping prasyarat fungsional di atas, Parsons juga menilai, keberlanjutan sebuah sistem bergantung pada beberapa persyaratan yaitu:⁵⁷ sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya dan juga harus mampu harmonis dengan sistem lain; sistem harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem lain; sistem harus mampu mengakomodasi para aktornya secara proporsional; sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya; sistem harus mampu untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu; bila terjadi konflik menimbulkan kekacauan harus dapat dikendalikan; sistem harus memiliki bahasa aktor dan sistem sosial.

Menurut Parsons, persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dan norma ke dalam sistem ialah dengan sosialisasi dan internalisasi. Pada proses sosialisasi yang sukses, nilai dan norma sistem

⁵⁶ D.P. Johnson. *Op. Cit.* h. 90

⁵⁷ Peter Hamilton, *Op. Cit.* h. 67-73

sosial itu akan diinternalisasikan. Artinya ialah nilai dan norma sistem sosial ini menjadi bagian kesadaran dari aktor tersebut. Akibatnya ketika si aktor sedang mengejar kepentingan mereka maka secara langsung dia juga sedang mengejar kepentingan sistem sosialnya. Sementara proses sosialisasi ini berhubungan dengan pengalaman hidup dan harus berlangsung secara terus menerus dan dinamis, karena nilai dan norma yang diperoleh sewaktu kecil tidaklah cukup untuk menjawab tantangan ketika dewasa.⁵⁸

Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial dinamik yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Ketika satu sistem hilang disebabkan perbedaan maka hilang pula fungsi masyarakat. Namun patut dicatat, bagaimanapun fundamentalnya perbedaan antara masalah-masalah dinamik yang mengakibatkan perbedaan, tidak berarti langsung menghilangkan fungsi utama sebuah sistem, karena perbedaan-perbedaan tadi hanya bersifat *particular* dari keseluruhan pola sistem yang utuh.⁵⁹

Hal inilah yang dimaksud Guy Rocher, bahwa teori Parsons itu ibarat *a set of Chinese boxing* ketika yang satu dibuka dia masih memiliki sesuatu yang lebih kecil, yang masih terdiri dari yang lebih kecil lagi dan seterusnya.⁶⁰

⁵⁸ Peter Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya: Sebuah Pengantar*, terj. Hartono adikusumo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 143

⁵⁹ *Ibid*, h. 189

⁶⁰ Guy Rocher, *Talcot Parsons and American Sociology*, (London: Nelson, 1974), h. 4

Pesantren adalah lembaga pendidikan sekaligus lembaga dakwah yang mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan pendidikan formal lainnya. Model pendidikan Pesantren sebagaimana dikemukakan “Pendidikan di Pesantren adalah pendidikan sepanjang waktu dengan sistem non klasikal, yang kemudian dikenal dengan nama bandongan atau sorogan dan wetonan”.⁶¹ atau dalam pengertian lain “Pesantren adalah keseluruhan lingkungan masyarakat tempat para santri itu mukim dan menuntut ilmu, disebut Pesantren”.⁶² Pendidikan dan pengajaran di pesantren adalah pendidikan sepanjang waktu dengan Kyai sebagai tokoh sentral. Model pendidikan tidak terikat dengan aturan formal seperti kurikulum, guru maupun waktu belajar mengajar. Kebebasan sesuai dengan kebutuhan para santri itu yang diterapkan. Sehingga selain memiliki kekhususan, pesantren punya kebebasan menentukan tujuan dan sikap. Beberapa karakteristik pesantren secara umum adalah: Pesantren tidak menggunakan batasan umur bagi para santri. Tidak menerapkan batas waktu pendidikan, karena sistem pendidikan di pesantren bersifat pendidikan seumur hidup (long life education).⁶³ Siswa dalam pesantren tidak diklasifikasikan dalam jenjang menurut kelompok usia, sehingga masyarakat yang ingin belajar bisa menjadi santri atau siswa. Santri boleh bermukim di pesantren sampai kapanpun atau bermukim selamanya, dan jika dikehendaki dapat pindah

⁶¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Unit Keterampilan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren. Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I, 1981), h. 43

⁶² Marwan Sarijo, *Sejarah Pondok Pesantren Untuk Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Desa* (Taskap Peserta Kursus Reguler Angkatan XIX Mabes ABRI Lemhanas, 1980), h. 21

⁶³ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasusa Pondok Pesantren Tebuireng* (Malang, Kalimashada Press, 1992) h. 65

untuk mencari guru ke tempat lain atau pulang ke tempat asal bila telah cukup dan mampu mengembangkan diri sendiri. Untuk santri yang berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain disebut santri kelana. Pesantren tidak mempunyai aturan administrasi (tata usaha) yang tetap sehingga seseorang dapat bermukim di pesantren tanpa mengaji jika ia mau asal ia memperoleh nafkah sendiri dan tidak menimbulkan masalah dari tingkahlakunya.⁶⁴ Sedang menurut Geertz, orang mengaji berdasar kecepatannya masing-masing, belajar sebanyak-banyaknya atau sekedarnya menurut kebutuhan mereka.⁶⁵ Berdasarkan keputusan lokakarya yang diadakan oleh Departemen Agama tahun 1981 menghasilkan keputusan bahwa tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua kehidupannya dan menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.⁶⁶ Dari tujuan umum ini dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus, yaitu: Mendidik santri (siswa) menjadi seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang ber-Pancasila. Mendidik santri untuk menjadi muslim selaku kader-kader Ulama dan Muballigh berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, dalam mengamalkan syari'at Islam secara utuh dan dinamis.

⁶⁴ *Ibid*, h. 71

⁶⁵ *Ibid*, h. 87

⁶⁶ Departemen Agama. *Op. Cit.* h. 61

Mendidik para santri untuk memperoleh kepribadian serta mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan bagi dirinya serta bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan juga regional (pedesaan/masyarakat lingkungan). Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan khususnya pembangunan mental spiritual. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsanya.

Seiring dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan masyarakat menantang hidup, pesantren sebagai lembaga pendidikan non klasikal diberbagai tempat akhirnya merubah dirinya dengan membuat model pendidikan klasikal walaupun masih juga ada pendidikan model *weton* atau *sorokan (non klasikal)*,⁶⁷ biasanya di rumah Kyai atau di masjid atau musolla. Untuk menghasilkan santri atau sumber daya manusia yang berkualitas pada lulusan pesantren, Lokakarya intensifikasi Pengembangan Pesantren, Departemen Agama merekomendasikan untuk karakteristik kualitas santri sebagai berikut:

1. Mampu menjadi teladan dan pendidik (*murobbi*) di lingkungan keluarga, pesantrennya sendiri dan masyarakat luas.

⁶⁷ Kedua istilah ini sangat populer di kalangan pesantren, terutama yang masih menggunakan kitab kuning sebagai sarana pembelajaran utama. Sorogan merupakan metode pembelajaran yang diterapkan pesantren hingga kini, terutama di pesantren-pesantren salaf. Usia dari metode ini diperkirakan lebih tua dari pesantren itu sendiri. Karena metode ini telah dikenal semenjak pendidikan Islam dilangsungkan di langgar, saat anak-anak belajar al-Qur'an kepada seorang ustaz atau kyai di kampung-kampung. Penelusuran istilah ini diambil dari Zamakhsyari dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994. cet. Ke-6), h. 28-29

2. Percaya pada diri sendiri (optimistik), memiliki wawasan yang berorientasi masa depan serta tanggap dan mampu menghadapi segala problematika hidup dan kehidupan yang sedang berlangsung saat ini maupun masa depan nanti.
3. Mampu menjadi motor perkembangan di segala bidang dan secara inklusif memiliki sikap responsif dan selektif terhadap ide-ide inovatif dan ide-ide modernis yang sedang berkembang.
4. Memiliki sifat dan sikap serta watak kepribadian yang bersedia untuk selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya secara riil.⁶⁸

Perkembangan terakhir dari sistem pendidikan pesantren telah mengalami perubahan besar sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Sehingga untuk mengantisipasi perkembangan dapat dilihat klasifikasi tingkatan pesantren, disebutkan bahwa ada lima macam pola pesantren, dari yang paling sederhana sampai pada yang sudah maju:

1. Pola ke satu, pesantren yang terdiri dari masjid dan rumah kyai.
2. Pola ke dua, pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai dan pondok.
3. Pola ke tiga, pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok dan madrasah.
4. Pola ke empat, pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah dan tempat keterampilan.
5. Pola ke lima. Pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olah raga dan sekolah umum.⁶⁹

Pesantren yang disebut terakhir inilah yang sering dikatakan sebagai pesantren modern, disamping bangunan –bangunan yang sudah disebut diatas, masih ada lagi bangunan lain seperti perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor, toko, penginapan tamu dan fasilitas lainnya.

⁶⁸ Depatemen Agama. *Op. Cit.* h. 55

⁶⁹ Marwan Sarijo. *Op. Cit.* h. 76

Pengembangan kualitas manusia merupakan jawaban terhadap kompetisi utama dalam menyediakan tenaga kerja unggulan. Hanya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing dan bertahan dalam gelombang pertumbuhan penduduk dan lapangan kerja yang relatif semakin mengecil. Indonesia akhir tahun 1998 akibat krisis moneter terjadi penyempitan lapangan kerja sehingga banyak terjadi pemutusan kerja yang membuat semakin ketatnya persaingan mencari kerja. Dalam konteks pembangunan di Indonesia pengembangan kualitas manusia adalah sasaran utama untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya.

Perlunya kualitas manusia dan masyarakat adalah kualitas yang kompetitif dengan sumber daya manusia lainnya sebagai penyedia tenaga kerja. Berlimpahnya sumber tenaga kerja baru dan sedikitnya lapangan kerja mengharuskan adanya upaya lintas kerja dengan penambahan keterampilan lainnya. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan atau perubahan berencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perubahan sebagai langkah untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik, haruslah perubahan fisik yang nyata maupun perubahan yang bersifat non fisik (moral spiritual). Rencana perubahan atau pengembangan sumber daya manusia haruslah berdasarkan kebutuhan bukan pada keinginan semata. Proses perubahan sosial berencana selalu meliputi tiga tahapan, yaitu tahapan unfreezing atau percairan dari keadaan yang ada sekarang, tahapan moving atau pembentukan perilaku / pola yang baru dan terakhir tahapan

freezing atau tahapan pematapan atau pembakuan dari perilaku atau pola yang akan dilembagakan.

Pengembangan kualitas manusia sebagai penunjang utama pembangunan akan berhimpit dengan kualitas masyarakat. Jika individu telah merubah dirinya menjadi manusia yang berkualitas maka masyarakat juga menjadi berkualitas. Terciptanya suatu masyarakat yang berkualitas, bermutu serta dinamis.⁷⁰

Effendi mengatakan: “Kualitas manusia dan masyarakat saling terkait. Dalam matryanya sebagai anggota keluarga, kelompok dan warganegara, manusia ikut ditentukan oleh interaksi dengan orang lain. Perciptaan kualitas perorangan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial dan hal-hal dalam masyarakat yang mengatur, mempengaruhi menunjang serta membentuk pola hidupnya. Kualitas bermasyarakat merupakan ciri kualitas manusia yang penting. Sebaliknya, kualitas ini tidak pula dapat dibangun tanpa membangun kualitas perorangan”.⁷¹

Membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia pada hakekatnya adalah membangun masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang sedang membangun tidak akan terjadi bahwa masyarakat semuanya menjadi berkualitas. Bisa saja hanya sebagian kelompok elitnya, tapi bisa juga sebagian besar. Sehingga pemberian peran kelompok harus seimbang namun lebih menitikberatkan paada yang kurang berkualitas. Saling memberi atau saling asih, asah dan asuh dalam suatu masyarakat sedang membangun adalah sangat penting artinya. Disinilah peran pimpinan baik formal maupun informal masyarakat termasuk para Kyai dan Ustadz, akan

⁷⁰ Sofian Effendi, *Membangun Martabat Manusia: Peranan ilmu ilmu Sosial Dalam Pembangunan* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996) h. 40

⁷¹ *Ibid*, h. 51

sangat membantu terciptanya usaha pengembangan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berarti terciptanya kualitas masyarakat.

Terciptanya kualitas masyarakat sebagai dasar pembangunan mempunyai ciri-ciri yang dipengaruhi oleh sosial budaya dan tujuan yang telah disepakati bersama. Potensi yang diharapkan muncul adalah kemampuan dan prestasi yang secara bersama dapat digunakan menunjang pembangunan dengan memperhatikan perilaku masyarakat.

Effendi mengatakan: “Secara umum untuk pembangunan nasional, kualitas masyarakat yang perlu dikembangkan mungkin harus mencakup ciri-ciri yang berhubungan dengan kelangsungan masyarakat itu sendiri. Dengan pertimbangan tersebut, diusulkan agar kualitas masyarakat ditelaah atas beberapa kelompok, yang meliputi kualitas (a) kualitas kehidupan masyarakat (b) kualitas kehidupan sosial politik (c) kualitas kehidupan kelompok dan (d) kualitas lembaga dan pranata kemasyarakatan”.⁷²

Pemberdayaan dan pembangunan Bagi negara-negara sedang berkembang memerangi kemiskinan atau pengentasan kemiskinan strategi pemberdayaan adalah yang paling tepat. Adanya masyarakat miskin di negara-negara dunia ketiga tidak lepas dari ketimpangan dan penghisapan ekonomi oleh negara kaya pada negara-negara miskin. Kemajuan teknologi negara maju yang pesat malah membuat ketimpangan bagi negara dunia ketiga karena sumber daya manusia yang belum siap, sehingga melahirkan negara kaya dan miskin karena strategi pertumbuhan ekonomi yang diterapkan tidak cocok. Pembangunan ekonomi yang di negara industri maju dipacu dengan pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun naik, bagi negara dunia ketiga akan terjadi pemusatan modal yang tidak wajar. Krisis

⁷² *Ibid*, h. 33

ekonomi yang parah seperti terjadi di Indonesia awal 1998 membuktikan bahwa pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan dan ketergantungan modal adalah merugikan rakyat.⁷³

Ketimpangan kemajuan teknologi di negara maju dan negara berkembang sejak dulu telah memicu adanya ketimpangan ekonomi sehingga melahirkan negara kaya dan miskin. Kesenjangan antara negara yang kaya dan miskin semakin lama semakin dalam. Terdapat sekelompok kecil negara-negara yang sangat kaya dan kelompok negara-negara yang jumlahnya jauh lebih besar tetapi sangat miskin; Bahwa keseluruhan negara-negara yang termasuk kelompok tersebut pertama sudah bertumpu kuat pada pola perkembangan ekonomi yang terus menerus, sedangkan kemajuan rata-rata dalam kelompok tersebut belakangan adalah lebih lambat, dimana banyak negara selalu terancam oleh bahaya ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari jerat stagnasi atau bahkan mengalami kemerosotan tingkat pendapatan rata-rata.

Ketimpangan ekonomi yang disebut kemiskinan merupakan penyakit kronis pada beberapa negara berkembang sampai sekarang ini, walaupun bentuk dan volume dari kemiskinannya berbeda di era lima puluhan setelah perang dunia kedua. Upaya untuk mengurangi kemiskinan dunia di negara miskin dicanangkan “War on Poverty” “perang terhadap kemiskinan dan ketidakadilan dunia. Rontoknya macan Asia Korea Selatan dan berlarut larutnya penyelesaian krisis ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan transisi dibawah B.J. Habibie merupakan indikator bahwa negara sedang berkembang akan terancam ketidakmampuan lepas dari kemerosotan ekonomi dan perkapita income.⁷⁴

⁷³ Abdul Wahab Solichin, *Ekonomi Politik Pembangunan* (Malang, P.T. Danar Wijaya Brawijaya University Press, 1999) h. 12

⁷⁴ *Ibid*, h. 39

Bantuan negara kaya terhadap negara-negara berkembang untuk menanggulangi kesengsaraan dan kemiskinan termasuk Indonesia medio 1998 sudah sangat terpuruk dan kemiskinan semakin melebar, harus tidak diboncengi dengan ikatan dan tekanan politik demi kepentingan negara maju. Arogansi negara kaya seperti terjadi pada tahun tujuh puluhan terhadap negara miskin dimana 400 juta penduduk dunia di negara-negara dunia ketiga hidup dalam keadaan serba sulit dan sengsara tanpa sentuhan bantuan yang arif dan manusiawi. Apa yang terjadi di negara-negara sedang berkembang soal kemiskinan seakan-akan merupakan kekeliruan negara miskin itu sendiri karena tidak secara tepat meniru apa yang telah dilakukan negara-negara maju. Padahal tidak semua yang berhasil dilakukan di negara maju berhasil pula di negara berkembang.

Ketimpangan ini sempat dilihat oleh T. Mulya Lubis mengatakan: “Adalah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keadaan serba sengsara 400 juta manusia tersebut tidak saja dari segi kurangnya kalori makanan, tetapi dari segala segi. Kita bisa melihatnya dari segi politik, hukum, informasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Mereka adalah the poorers of the poors - orang-orang yang underrepresented, orang-orang yang tidak masuk hitungan. Seolah mereka hanya sederet angka yang mengotori tabel yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penelitian. ironi yang terjadi adalah di Dunia Kesatu banyak gandum yang dijadikan makanan ternak yang jumlahnya lebih banyak dari gandum yang seyogianya dikirimkan ke orang-orang miskin di Dunia Ketiga. Bayangkan di Jerman pada tahun 1972 kepada ternak diberikan 34 juta kwintal gandum, dan ketika pada tahun 1973 terjadi kelaparan di kawasan Gurun Sahel di Afrika, negara-negara di situ hanya menerima 0,6 juta ton gandum, padahal mereka membutuhkan 9,4 juta ton gandum untuk mencegah terjadinya kematian karena kelaparan”.⁷⁵

⁷⁵ Parenti, Michael, *Power and The Powerless* (New York USA, Copyright by St. Martin's Press, inc, 1978) h. 60

Begitu tidak berdayanya negara-negara miskin menghadapi arogansi negara kaya walaupun badan dunia PBB siap menjadi jembatan bantuan kepada negara miskin. Sikap pertentangan kelompok negara-negara utara selatan dalam perekonomian yang tidak seimbang masih menempatkan negara-negara dunia ketiga yang relatif miskin, menjadi ajang penghisapan negara-negara maju dan kaya. Dalam bahasa yang menyakitkan Rudolf Strahm dalam bukunya “Yang Berlimpah Dan Yang Merana” diatas “ternak kalangan kaya menghabiskan bahan makan pokok kaum miskin”. PBB yang disebut sebagai wakil bangsa-bangsa di dunia dalam kenyataannya sebagai alat negara besar yang menyandang dana kegiatan PBB tersebut. Oleh karenanya persoalan yang menyangkut kepentinganan negaranegara kecil sering diabaikan. Untuk mengatasi dan jalan keluar dari aset kemiskinan perlu pemberdayaan terutama ditujukan kepada masyarakat langsung. Pemberdayaan harus multidimensional yang meliputi sosial, ekonomi, politik, psikologi, budaya dan lainnya.

Dengan mengutip pendapat para ahli ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan. Pertama pendekatan kultural (Oscar Lewis), kemiskinan budaya akan terjadi kemiskinan individual, kemiskinan relatif dan kemiskinan struktural. Budaya kemiskinan adalah desain kehidupan bagi orang miskin yang berisikan pemecahan bagi problema-problema hidup mereka, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kedua pendekatan situasional (Charles A. Valentine) kemiskinan bukan karena

turunan tetapi ada situasi yang menekan. Situasi menekan diakibatkan karena truktur total yang ada dalam sistim sosial yang ada dalam masyarakat.

Ketiga pendekatan interaksional sebagai pendapat yang diajukan oleh (Hebert J. Gansd) kemiskinan karena terjadinya interaksi antara faktor kebudayaan yang telah tertanam dalam diri mereka secara turun temurun dari budaya yang mereka anut dan faktor situasi yang menekan. Pergeseran budaya memang bisa terjadi perubahan di masyarakat. Perubahan masyarakat yang implikasinya kemiskinan adalah hal buruk yang kadang-kadang terjadi dalam perubahan di masyarakat.⁷⁶

Dari pendekatan kemiskinan dimana kemiskinan tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi, tetapi juga, sosial, budaya dan politik. Sehingga menjadi sulit bila fenomena kemiskinan diobyektifkan dalam bentuk angka-angka. Mencari ukuran dan menentukan garis batas kemiskinan di beberapa daerah yang berbeda baik budaya maupun keadaan alam juga menjadi sulit. Hal ini tidak hanya dilihat dari berapa rupiah penghasilan yang diterima, tetapi dipengaruhi juga oleh kebutuhan minimal daerah serta bentuk kepuasan. Sejumlah uang yang dimiliki mungkin cukup bagi suatu keluarga di daerah subur, tetapi menjadi kurang pada daerah yang kurang subur karena kebutuhannya yang harus dibeli. Bank Dunia yang dianggap kompeten menentukan garis kemiskinan menetapkan bahwa garis batas kemiskinan adalah US \$ 50 dan US \$75 perkapita per tahun, yang diperuntukkan masing-masing bagi daerah pedesaan dan perkotaan. Perbedaan garis batas antara kota dan desa ini berkaitan erat dengan perbedaan tingkat biaya hidup diantara kedua wilayah tersebut.

⁷⁶ *Ibid*, h. 55

Pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan ekonomi adalah untuk menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Indonesia sebagai negara sedang berkembang awal rezim orde baru sangat terpengaruh oleh pemikiran besar di dunia tentang strategi pembangunan untuk memerangi kemiskinan. Laporan akhir dokumen proyek program pengembangan kawasan desa-kota terpadu Universitas Gadjah Mada kerjasama dengan BAPPENAS 1998 dapat dilihat adanya urutan pergeseran konsep pembangunan bagi penanggulangan kemiskinan:

1. Growth Strategy
2. Growth with Distribution
3. Appropriate Technology
4. Basic Needs Development
5. Sustainable Development Empowerment.⁷⁷

Kekuasaan masyarakat yang diekspresikan melalui partisipasi harus mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri melalui para tokoh dan sesepuh masyarakat. Peran serta dalam praktek ini memang masih menghadapi berbagai kendala. Kooptasi maupun arogansi birokrasi pemerintah masih menjadi kendala utama pelaksanaan partisipasi bagi pembangunan. Sehingga diperlukan pemanfaatan kepemimpinan informal masyarakat di pedesaan. Sulaiman menyatakan: “Usaha pengembangan inisiatif lokal dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan di pedesaan tidaklah mudah. Tantangan dalam pengembangan usaha tersebut terlebih dahulu perlu penyelarasan pengertian dan penghayatan terhadap berbagai peraturan (yuridis formal) tentang susunan keorganisasian, tata kerja/mekanisme kerja, fungsi dan pembinaan kelembagaan atas organisasi di pedesaan”.⁷⁸

Salah satu pemanfaatan kepemimpinan masyarakat pedesaan untuk menghindari hambatan adalah peranan Kyai dengan pesantrennya. Sebagai panutan bisa mendorong memotivasi masyarakat untuk melakukan

⁷⁷ Sofian Effendi, *Op. Cit*, h. 92

⁷⁸ Imam Suprayogo, *Kyai Dan Politik Di Pedesaan*. (Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya). h. 52-58

pembangunan sebagai wujud perubahan sosial. Sulaiman mengatakan: “Kyai, santri, pesantren dan ajaran Islam, pada saat yang sama, semuanya memiliki kekuatan kreatif dan aktif membentuk dan mengubah struktur sosial serta institusi tradisi, begitu pula lingkungan sekitarnya.”⁷⁹

Kyai, sebagai agen perubahan, menurut pandangan Geertz, hanya berperan sebagai makelar budaya (*cultural broker*) ; pengaruh Kyai hanya terletak pada pelaksanaan fungsi makelar, secara politis Kyai yang tidak mempunyai pengalaman dan keahlian tak mampu memimpin dengan baik hubungan masyarakat-bangsa yang modern.⁸⁰ disertasi tersebut telah digugat oleh banyak hasil penelitian, diantaranya Hirokosi menyatakan bahwa Kyai telah berperan sebagai pengambil keputusan, menggerakkan orang desa untuk mendukung keputusan masyarakat. Kyai berperan dalam perubahan sosial dengan keunggulan kreativitasnya, yaitu “adaptasi kreatif” dalam upaya perubahan sosial. Pembangunan yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dimana peran institusi di pedesaan diharapkan ikut mendorong, mengawasi dan melestarikan, maka Kyai, ustadz dan para santri dapat digolongkan sebagai aktor pembaharu.⁸¹

Hal ini sejalan dengan ajaran agama yang dianutnya tentang pembaharuan dan pelestarian adalah: “*Almukhafadhotu ala qodimis sholih, wal akhdhu bil jadidil aslakh*” yang artinya memelihara barang / keyakinan lama yang baik dan mengambil barang atau sesuatu yang baru yang lebih baik

⁷⁹ *Ibid* h. 31

⁸⁰ *Ibid*, h. 101

⁸¹ *Ibid d*, h. 12

lagi. Sehingga Kyai tidak akan menolak pembaharuan atau pembangunan yang itu semua akan lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Sikap Kyai yang selalu menunjuk badal (pengganti) dalam kegiatan menjalankan peran di masyarakat adalah upaya untuk pengkaderan. Kepatuhan yang dimiliki oleh para santri kepada Kyai dalam kehidupan pesantren merupakan kaitan moral akhlaq sehingga peran yang dilakukan santri memiliki kadar yang sama dengan Kyai yang dibadali. Sehingga pelaku peran yang dijalankan antara Kyai dan santrinya merupakan pelaku peran group yang menimbulkan sinergi kinerja yang lebih proporsional dan berkualitas. Hal ini disebabkan pelaksanaan peran aktor dibekali pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya. Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada para individu maupun golongan adalah hal penting sebagai legitimasi pelaksanaan peran.

Peran merupakan suatu pola perilaku yang tersusun pada sekitar hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan suatu posisi status tertentu dalam suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Suatu peran yang dimiliki seseorang dalam setiap situasi diartikan sebagai seperangkat harapan bagi perilakunya yang dipegang pihak lain dan oleh orang yang dikenai peran tersebut. Posisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, peran harus menopong untuk mewujudkan keinginan bersama. Peran tidak dilaksanakan tanpa adanya harapan dari yang memberi peran dalam hal ini masyarakat, maka aktor tidak boleh menyimpang dari tatanan bersama dalam melaksanakan fungsinya. Sehingga terjadi jalinan kerja sama yang harmonis

dalam masyarakat. Mobilisasi individu kedalam peran dan status yang ditujukan demi upaya kinerja suatu kolektif biasanya disebut “institusi “. Dalam kaitan peran aktor kyai untuk pemberdayaan masyarakat maka “institusi keluarga” dalam menjabarkan lebih jelas salah satu pola subsocietal khusus yang mapan, namun peran dan statusnya saling berhubungan. istilah “institusi “(pranata) juga menunjuk pada struktur dari otoritas kelompok, seperti masjid (pesantren), militer, sekolah, badan usaha, badan pemerintah dan partai politik. Sehingga peran mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan keinginan bersama sesuai dengan status yang disandangkannya.⁸² Michael Parenti by “*role “and “status” I am referring to the repectable and modal components social behavior, the expected, predetermined privileges and responsibilities of any social position.*⁸³

Pesantren yang secara sosial memiliki kultur masyarakat yang sangat beragam perlu dilakukan proses penyatuan visi misi dan tujuan khususnya terkait dengan pemberdayaan Masyarakat yang ada. dalam sudut pandang suatu proses, pemberdayaan masyarakat pesantren memerlukan studi lain yang bisa dijadikan barometer sebagai ilmu terapan untuk melihat proses dari pemberdayaan itu sendiri, dalam hal ini ilmu manajemen strategi secara umum dan strategi pemberdayaan secara khusus menjadi satu dari banyak aspek yang tepat untuk mengetahui permasalahan penelitian terkait.

⁸² Susanto, S. Astrid, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial* (Bandung, Penerbit Binacipta, 1979), h. 70

⁸³ Parenti, Michael, *Op. Cit*, h. 88

Bidang pengembangan masyarakat pesantren pada dasarnya sangat kompleks. Dari sisi ekonomi misalnya perlu, adanya juru da'wah yang merumuskan dan melakukan tindakan dakwah nyata dalam bentuk konkret terfokus memperhatikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Dari sisi pertanian atau perkebunan, sudah semestinya pelaku da'wah melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi yang dapat setidaknya menstimulus masyarakat untuk berjiwa mandiri. Baik mandiri dalam berfikir maupun mandiri dalam ekonomi.

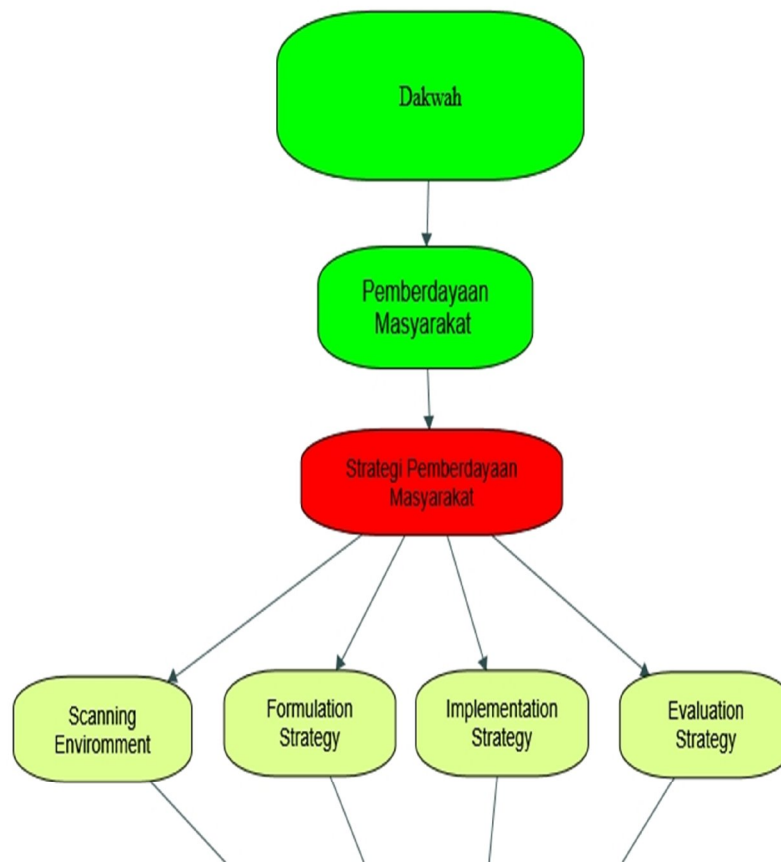
Masih banyak lagi dimensi-dimensi pemberdayaan masyarakat pesantren yang harus terus disentuh, dilakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi yang kesemuanya itu merupakan tugas besar yang diemban pelaku da'wah dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekaligus sebagai ladang dakwah *bil hal* bagi pelaku da'wah dewasa ini.

Pemberdayaan masyarakat tentunya bukan hanya sebuah konsep yang berjalan begitu saja, perlu dilakukan perumusan-perumusan untuk memberikan rambu atau batasan dari pemberdayaan itu sendiri. Bagaimana perencanaan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pesantren mampu mengakomodir kearifan lokal masyarakat sehingga pemberdayaan yang dimaksud tidak terkesan memaksakan namun lebih pada menjadikan potensi masyarakat menjadi potensi yang bernilai guna.

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat pesantren tentunya bukan hanya sekadar suatu proses, lebih dari itu pemberdayaan masyarakat seyogyanya berlandaskan pada nilai ke-Islaman dan terstruktur dengan baik selayaknya suatu strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu menjadi solusi kemandulan sistem dari pemberdayaan masyarakat.

Perlu dirumuskan serta terkonsep dengan baik bagaimana strategi-strategi pemberdayaan masyarakat mengembangkan potensi sumber daya yang ada agar dalam prosesnya pemberdayaan masyarakat terencana pula secara strategis, terukur dan terarah.

Gambar 1.
Kerangka Fikir Strategi Pemberdayaan Masyarakat



F. Kajian Yang Relevan

1. **Disertasi** yang berjudul *Strategi Pondok Pesantren Dalam Menumbuhkan Semangat Jiwa Kewirausahaan Masyarakat Di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya menjelaskan tentang bagaimana konsep kewirausahaan **Pondok Pesantren Aswaja Lintang Songo, Bantul**. Hasil penelitiannya adalah bahwa konsep kewirausahaan adalah kemampuan komunitas masyarakat untuk berfikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya pemikiran tersebut dijadikan dasar untuk menciptakan peluang dan sesuatu yang baru serta berbeda.
2. *Journal of Non-Formal Education and Community Empowerment* Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Masyarakat miskin

merupakan masyarakat dalam kondisi serba kekurangan seperti: kebutuhan makan, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan pendapatan. Untuk itu perlu diketahui bagaimana profil masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Bandung Purworejo dan bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi pada subyek yang terdiri dari 1 Kepala Kelurahan, 1 Pamong Kelurahan, 4 masyarakat miskin. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini masyarakat miskin di Kelurahan Bandung adalah masyarakat yang memiliki kondisi kesejahteraan rendah. Sandang, pangan, papan yang belum sesuai dengan masyarakat pada umumnya (masyarakat ekonomi menengah keatas), kondisi tempat tinggal yang kurang layak seperti dinding rumah yang rusak dan atap rumah yang rusak, pendidikan hanya SMP, kesehatan dan gizi yang tidak tercukupi, memiliki pekerjaan tidak tetap seperti kuli bangunan dan kuli pasar. Strategi pemberdayaan yang dilakukan antara lain: pelatihan pembuatan paving yang diikuti oleh warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, membuat organisasi KSM maskumambang yang mengurus kegiatan pemberdayaan, bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan seperti pengawasan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Saran yang disampaikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

perlu diupayakan, kegiatan pemberdayaan yang disusun dan dilaksanakan seharusnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin dan ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

3. Jurnal Bhanu Prawirasworo, Dra.Tri Yuniningsih, M. Si, dan Dra.Maesaroh, M. Si yang berjudul *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangunharjo Melalui Program Pnpm Mandiri*. penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif dimana penelitian ini focus menjelaskan tentang rencana strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pemerintah. Hasil penelitiannya adalah Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mangunharjo menggandeng pihak Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mangunharjo. Fungsi BKM dan LPMK adalah membantu Kelurahan dalam penjangkauan program pemberdayaan masyarakat.
4. Jurnal Tabularasa PPs UNIMED *Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Penelitian kualitatif ini focus pada Perencanaan partisipatif sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan public, sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Hasil dari penelitian ini adalah Partisipasi dan transparansi akan

menjadi perangkat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Legitimasi sendiri dipahami sebagai pengakuan dan dukungan dari rakyat. Akuntabilitas menjadi indikator kemampuan pemerintahan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif memegang peran penting dan merupakan aplikasi fungsi otonomi daerah dalam pembangunan.

5. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Santri dan Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon pada Jurnal penelitian hukum ekonomi syari'ah IAIN Cirebon. Penelitian ini menyatakan bahwa interaksi tersebut pada akhirnya mengalami transformasi makna dan peran, yakni mengarahkan kepada perubahan, pengembangan dan keberdayaan santri, yang diwujudkan dalam bentuk yang beraneka ragam, termasuk ke dalam kepedulian terhadap masalah yang dihadapi khususnya masalah ekonomi. Disinilah potensi pesantren dengan melakukan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan inisiatif dan kreatif dari masyarakat sebagai sumber utama pembangunan dan yang menekankan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan dari proses pembangunan. Dari hasil penelitian, program-program pemberdayaan telah berhasil dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain; adanya peralatan yang sudah cukup

mendukung. Adanya pengawasan dari pengurus pondok, dan adanya jaringan yang cukup bagus.

Dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian tentang pemberdayaan masyarakat terutama yang berbasis pondok pesantren masih layak untuk diteliti dan senantiasa harus diperbaharui. karena sejauh penelusuran penulis belum ditemukan hasil penelitian yang membahas permasalahan yang diangkat penulis. Dalam penelitian ini lebih fokus pada bagaimana pemberdayaan ditinjau dari sudut pandang suatu proses. Dengan mengoptimalkan strategi untuk memberdayakan masyarakat akan menjadi solusi dalam pengembangan ekonomi Islam serta dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga penelitian ini diharapkan akan menjadi pola baru dalam menyusun strategi pemberdayaan masyarakat di pondok pesantren tentunya dengan konsep yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.